KEPALA DESA CIKADUT
KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIKADUT
NOMOR 05 TAHUN 2017

T E N T A N G

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AHIR
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKADUT

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II , sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II Tahun 2017.

Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);

5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12 Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

13 Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);

15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);

16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);

17 Peraturan Menteri Desa, Pembanunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161);

19 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Seri E).

20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 19 Oktober 2016 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.

21 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.

22 Peraturan Bupati Bandung No 07 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana

Perimbangan Desa;

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa ;

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

25 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuanga Desa;

26 Peraturan Bupati Bandung Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;

27 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Dana Desa;

28 Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan keuangan Program sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017Nomor 12);

29 Peraturan Desa Cikadut Nomor 01 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 - Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 - Tahun 2019

30 Peraturan Desa Cikadut Nomor 01 (satu) 2017. Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) Cikadut.

31 Peraturan Desa Cikadut Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Cikadut Tahun 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKADUT

dan

KEPALA DESA CIKADUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIKADUT TENTANG REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 SEMESTER II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUDadalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh kepala desa untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.144.258.500,-
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	75.405.000,-
b. Dana Desa (APBN)	Rp.	870.297.000,-
c. Bagian dari hasil Pajak dan retribusi Daerah	Rp.	136.888.300,-
d. Alokasi Dana Desa	Rp.	846.668.200,-
e. Bantuan Provinsi	Rp.	165.000.000,-
f. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	Rp.	50.000.000,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	692.652.500,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.003.356.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	46.200.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	402.050.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0
Jumlah Belanja	Rp	2.144.258.500,-
Surplus/Defisit	Rp	0
a. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	-

==========

BAB III

STRUKTUR REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 3

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Semester II dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.128.161.000,-
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	59.307.500,-
b. Dana Desa (APBN)	Rp.	870.297.000,-
c. Bagian dari hasil Pajak dan retribusi Daerah	Rp.	136.888.300,-
d. Alokasi Dana Desa	Rp.	846.668.200,-
e. Bantuan Provinsi	Rp.	165.000.000-
f. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	Rp.	50.000.000,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	676.205.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.003.706.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	46.200.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	402.050.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-
3. Jumlah Belanja	Rp	2.128.161.000,-
Surplus/Defisit	Rp	16.097.500,-

==========

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -
Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. -

==========

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Cikadut
Pada tanggal : 29 Desember 2017
KEPALA DESA CIKADUT

TTD

L I S T A T I

Diundangkan di : Cikadut
Pada tanggal : Desember 2017.
SEKRETARIS DESA CIKADUT

TTD

I M A N U D I N
Nip. 196711062007011029

LEMBARAN DESA CIKADUT TAHUN 2017
NOMOR..

PERATURAN DESA CIKADUT

NOMOR : 05 TAHUN 2017

TENTANG

REALISASI PERATURAN DESA CIKADUT NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

SEMESTER AHIR

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

DESA CIKADUT

KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017